



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT



2020-2024



RENCANA STRATEGIS
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT 2020 – 2024

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2020

RENCANA STRATEGIS
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG BARAT 2020
– 2024

No. Publikasi : 3217.1501
Katalog BPS : 1201005.3217
Ukuran Buku : B5 (18,2 cm x 25,7 cm)
Jumlah Halaman : vi + 84 halaman

Naskah:
Tim Penyusunan Renstra
BPS Kabupaten Bandung Barat

Gambar Kulit:
Tim Penyusunan Renstra
BPS Kabupaten Bandung Barat

Diterbitkan oleh:
BPS Kabupaten Bandung Barat

KATA PENGANTAR

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rentang lima tahun ke depan, BPS Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung Barat periode 2020 - 2024. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Renstra BPS RI dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Agar seluruh program dan agenda dalam Renstra dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi setiap tahun. Evaluasi yang dimaksud mencakup perubahan muatan Renstra termasuk indikator kerjanya. Hal ini penting dilakukan agar sesuai dengan perubahan proses bisnis yang terjadi di BPS.

Dokumen Renstra BPS Kabupaten Bandung Barat periode 2020 - 2024 ini merupakan dokumen Renstra BPS yang telah disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Renstra BPS Kabupaten Bandung Barat periode 2020 - 2024 ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandung Barat, Juli 2020
BPS Kabupaten Bandung Barat
Kepala,



Ir. Yayan Eka Tavipian, MT

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan sensus dan survei untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat umum.

BPS memegang peranan penting dalam hal penyedia data statistik yang berkualitas pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 ini. Selain itu, BPS juga merupakan pembina sekaligus koordinator kegiatan statistik dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif.

Sebagai langkah awal dalam menjalankan perannya tersebut, BPS menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik selama 5 tahun ke depan. Renstra BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024 ini memuat visi dan misi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN, sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Strategis BPS Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

DAFTAR ISI

Hal.

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1.....	7
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kondisi Umum	2
1.3. Potensi dan Permasalahan Umum	5
1.3.1. Potensi	5
1.3.2. Permasalahan	7
BAB2	10
2.1. Visi.....	11
2.2. Misi.....	11
2.3. Tujuan	14
2.4. Sasaran Strategis	18
2.4.1. Nilai-Nilai BPS.....	22
BAB3.....	25
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS RI.....	26
3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan	36
3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19 CORONA37	37
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Bandung Barat	39
3.3. Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Bandung Barat	44
BAB 4.....	53
4.1. Target Kinerja.....	54
4.2. Kerangka Pendanaan	63
BAB5	64
5.1. Penutup	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2. 1. Misi yang dikaitkan dengan Visi BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024.....	12
Tabel 2. 2. Rumusan Visi, Misi dan Tujuan BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024	16
Tabel 2. 3. Indikator dan target dari tujuan BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024	18
Tabel 2. 4. Tujuan dan Sasaran Strategis Teknis BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024.....	19
Tabel 3. 1. Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024.....	47
Tabel 4. 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020	62
Tabel 4. 2. Alokasi Anggaran 2020-2024 Menurut Program (Juta Rupiah)	63

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2. 1. Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat 2020-2024.....	22
Gambar 3. 1. Interlink Antara Sistem dalam rangka Peningkatan Pelayanan Statistik.....	31



BAB 1

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. KONDISI UMUM

1.3. POTENSI & PERMASALAHAN



1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan berbagai rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. Rencana pembangunan tersebut dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu dan menyesuaikan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Rencana Strategis BPS Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang handal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan outcome dan output pada level strategis. Hal ini merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan *performance based budgeting*.

Secara umum, perencanaan strategis merupakan proses perumusan tujuan dan sasaran untuk suatu jangka waktu perencanaan secara sistematis

dan formal. Hal ini diikuti dengan identifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki ditunjang dengan input data yang relevan, sehingga dapat disusun suatu strategi dan kebijakan dan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan.

1.2. Kondisi Umum

Data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya. Perkembangan kondisi pembangunan lima tahun kedua banyak menggunakan data BPS.

Pada tahun 2019, laju PDRB Kabupaten Bandung Barat sebesar 5,05 persen, lebih lambat dibandingkan laju PDRB tahun 2018 yang sebesar 5,50 persen. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2019 mencapai 47,18 triliun rupiah. Selain itu, *Human Development Index* (HDI) selalu mencatatkan pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun, terakhir mencapai 68,27 pada tahun 2019 setelah pada tahun sebelumnya mencapai sebesar 67,46. Sementara itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan, dari 10,06 persen pada tahun 2018 menjadi 9,78 persen pada tahun 2019. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan semakin mengecil di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 0,35 menjadi 0,33. Selanjutnya, persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja juga tinggi yaitu 95,29 persen. Hal ini menandakan jumlah orang yang berkerja lebih banyak dibanding pengangguran.

Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dilakukan oleh BPS sebagai amanat dari UU no 16 Tahun 1997, sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia.

BPS sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5

Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
2. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal; dan
3. Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat. Selama periode Renstra 2015-2019 berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan di antaranya penandatanganan MoU baik dengan instansi pemerintah, keikutsertaan BPS Kabupaten Bandung Barat dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik. Berbagai kesuksesan yang dicapai di periode Renstra 2015-2019 akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam berbagai upaya pencapaian yang ditempuh dalam periode yang baru ini.

Selain upaya mewujudkan SSN, BPS Kabupaten Bandung Barat juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Bandung Barat selama periode Renstra 2015-2019 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Pada dasarnya kegiatan sensus maupun survei yang dilaksanakan di BPS Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 -2024 dalam kerangka mendukung penyediaan ragam data dan indikator sosial-ekonomi pada level kabupaten ataupun provinsi, antara lain:

1. Data ekonomi hasil Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016 beserta tahapan lanjutannya, data tentang Pariwisata, transportasi dan indeks Harga Konsumen
2. Angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial.

3. Data pertanian KSA, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan, Data Produksi Perikanan.
4. Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, Industri Besar/Sedang, Nilai Tukar Petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Triwulanan Kegiatan Usaha, dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam hal diseminasi data, untuk kepentingan pengguna data BPS Kabupaten Bandung Barat menghasilkan sistem yang memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, antara lain: Pelayanan Statistik Terpadu.

Dalam upaya mendukung dan terus menjaga terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah penyalahgunaan dan pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung Barat telah menghasilkan capaian, diantaranya:

1. Pada tahun 2019, secara keseluruhan baik tujuan pertama hingga tujuan keempat serta masing-masing sasaran strategisnya telah tercapai. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 104.59 persen dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 105.08 persen.
2. Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim Inspektorat dari 59, point di tahun 2018 menjadi 60.57 point di tahun 2019. Dalam hal ini Nilai SAKIP BPS Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari CC menjadi B.
3. BPS Kabupaten Bandung Barat juga mengukir prestasi pada tahun 2019 yaitu menjadi salah satu BPS Kabupaten/Kota Terbaik Bidang Statistik Sosial Tahun 2019 dan BPS Kabupaten/Kota dengan Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Terbaik Tahun Anggaran 2019 yang diberikan oleh BPS Provinsi Jawa Barat. Penghargaan dari eksternal yaitu berupa penghargaan

Tanginas Award dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Rekonsiliasi Paling Awal periode bulan Januari, Oktober dan November 2019 yang diselenggarakan oleh KPPN Bandung II.

1.3. Potensi dan Permasalahan Umum

1.3.1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS Kabupaten Bandung Barat telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS Bandung Barat sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain :

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS Bandung Barat menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS Bandung Barat juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah

Potensi BPS diharapkan dapat menjadi *booster* transformasi di BPS dari sisi kualitas data, kelembagaan dan SDM, serta sistem dan infrastruktur tercakup secara keseluruhan dalam program STATCAP CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics*).

Secara kelembagaan, BPS Kabupaten Bandung Barat sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian integral dari BPS RI, dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS Kabupaten Bandung Barat pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (*National Statistics Office/NSO*) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Potensi BPS Kabupaten Bandung Barat dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan *mobile applications* akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan *mobile applications* akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun. Dengan penggunaan *mobile applications* ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses. Teknologi *cloud computing* juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu *data warehouse*.

Sustainable Development Goals (SDG's), menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. BPS Kabupaten Bandung Barat memiliki andil dalam mendukung pencapaian target

penyediaan data sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture, food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur.

1.3.2. Permasalahan

BPS Kabupaten Bandung Barat telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2020 – 2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kabupaten Bandung Barat harus mendapatkan respon yang tepat. Sehingga citra BPS Kabupaten Bandung Barat sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas dari sudut pandang responden maupun masyarakat umum sebagai pengguna data dapat terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan pengguna data terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data. Strategi komunikasi ini dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik secara akurat kepada setiap pengguna data.

Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung Barat merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung Barat adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas data statistik. BPS

Kabupaten Bandung Barat dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenalkan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

BPS Kabupaten Bandung Barat memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk perbaikan dan kemajuan serta penyesuaian dengan kemajuan teknologi agar setiap kebutuhan dan permintaan masyarakat dapat dipenuhi, dan setiap tantangan dan permasalahan yang ada dapat ditanggulangi.

Disisi lain, pemanfaatan Sumber Data Baru (di antaranya adalah *big data* dan data *administrative*) yang telah berkembang dewasa ini, belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS. Pentingnya *big data* tidak hanya melihat seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi juga apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut. Efek dalam pemanfaatan sumber data baru mungkin dapat menjadi jawaban yang memungkinkan, antara lain:

- 1) Pengurangan biaya,
- 2) Pengurangan waktu,

- 3) Pengembangan output, dan penawaran yang dioptimalkan,
- 4) Pengambilan keputusan yang cepat.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung Barat faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Setiap upaya dilaksanakan demi menghasilkan data akurat. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS Kabupaten Bandung Barat telah teridentifikasi, dan berusaha di tanggulangi dengan upaya antara lain berbagai pelatihan/briefing untuk setiap kegiatan, *capacity building*, dan *sharing knowledge* yang dikemas dengan berbagai metode serta konten yang menarik dan lain sebagainya. Sangat dianjurkan juga agar setiap pegawai dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai. Berbagai hal yang telah ditempuh ini bertujuan untuk menjawab, melengkapi, dan menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan terkait SDM antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi.



BAB 2

Visi, Misi & Tujuan

- 2.1. VISI
 - 2.2. MISI
 - 2.3. TUJUAN
 - 2.4. SASARAN STRATEGIS
- 

2.1. Visi

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020– 2024, melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif BPS Kabupaten Bandung Barat menetapkan visi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam menghasilkan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi BPS 2020-2024, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai Pembina data statistik.

2.2. Misi

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang ke 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut.

VISI BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS Kabupaten Bandung Barat 2020 -2024
		<i>1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional</i>
		<i>2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan</i>
		<i>3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional</i>
		<i>4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.</i>

Tabel 2. 1. Misi yang dikaitkan dengan Visi BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024

Uraian penjelasan dalam Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan),

interpretability (interpretabilitas).

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997). BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan

yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesionalisme ...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.”

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3. Tujuan

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan

dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi.

Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrase, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa statistic penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS Kabupaten Bandung Barat untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan berikut ini.

VISI BPS KABUPATEN BANDUNG BARAT 2020 – 2024		MISI BPS KABUPATEN BANDUNG BARAT 2020 -2024	
		Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	1.
2.	Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan		
3.	Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional		
4.	Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah		
TUJUAN	1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	
	2.	Meningkatnya kolaborasi, inetgrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	
	3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	
	4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	

Tabel 2. 2. Rumusan Visi, Misi dan Tujuan BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024

Rumusan tujuan BPS Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Tahun 2020-2024 adalah:

1. Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1 : Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Tujuan 2 : Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2 : Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3 : Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3 : Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistic untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan Misi ke-4 : Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama, pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk

perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistic yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistic di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	88	90	92	94	96
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	13	13	17	17	20
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	13	13	17	17	20
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	61,0	61.5	62,0	62,5	63,0

Tabel 2. 3. Indikator dan target dari tujuan BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024

2.4. Sasaran Strategis

Renstra BPS Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, yang artinya seluruh Program KL harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Kabupaten Bandung Barat ini termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan Presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan outcome dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kemnetrian/Lembaga, maupun antar Kementrian / Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS yang terdiri dari : (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customers, perspektif internal process, dan perspektif learning and growth. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan logic model framework dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel berikut ini.

T U J U A N	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Tabel 2. 4. Tujuan dan Sasaran Strategis Teknis BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS Kabupaten Bandung Barat pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif Stakeholder

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh

pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - Meningkatnya harmonisasi kegiatan survey
 - Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - Sosialisasi kepada masyarakat
 - Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.
 - Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - Membuat *customer relationship management*
 - Menyusun *data mining* pengguna data
 - Melakukan penyempurnaan pelayanan statistic
 - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - Melakukan penyempurnaan pelayanan statistic
 - Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator :
 - Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
 - Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistic
 - Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar

- c. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional dengan indikator:
 - Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survey
 - Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- d. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
 - Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas

2. Perspektif Customer

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif Internal Process

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif Learning and Growth

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Opini BPK atas laporan keuangan BPS
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS



Gambar 2. 1. Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat 2020-2024

2.4.1. Nilai-Nilai BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

Profesionalisme (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik);

Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel);
Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

1. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten : Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
- b. Efektif : Memberikan hasil maksimal.
- c. Efisien : Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.
- d. Inovatif : Selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus.
- e. Sistemik : Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi : Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi.
- b. Disiplin : Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Konsisten : Selarasnya kata dengan perbuatan.
- d. Terbuka : Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.
- e. Akuntabel : Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur

sebagai berikut:

a. Terpercaya

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.

b. Jujur

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas.

c. Tulus

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.

d. Adil

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.



BAB 3

Arah Kebijakan & Strategi

3.1. ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI BPS RI

3.2. ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI BPS KABUPATEN
BANDUNG BARAT

3.3. PROGRAM & KEGIATAN BPS KABUPATEN
BANDUNG BARAT



3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS RI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Dalam Dokumen RKP 2020, sebelum RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan yang termasuk dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2020 adalah:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan,
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
4. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
5. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup,
6. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Selain major project yang ada dalam Lampiran RPJMN, beberapa kegiatan baik prioritas bidang maupun prioritas lembaga yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPS semuanya yang mendukung agenda pembangunan sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan mendukung Prioritas Nasional sebelum RPJMN 2020-2024 ditetapkan di antaranya:

Prioritas Nasional yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020
Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang

- terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan melalui, Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.
2. Penyusunan Interregional Input-Output (IRIO) serta Komponen Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Data Desa (Podes Mini)
 3. Passenger Exit Survey (PES), Penyusunan Tourism Satellite Accounts (TSA), dan Pendataan Wisatawan Nusantara dan Pengembangan Data Statistik E-Commerce
 4. Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Prioritas Nasional yang Tidak Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS

Prioritas Nasional yang tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi BPS, baik yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dan RKP Tahun 2020, adalah Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Meskipun secara langsung tidak terkait, namun BPS memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian PN tersebut. Komitmen tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama pelaksanaan kegiatan terkait PN tersebut dengan K/L terkait, atau dengan pembinaan yang diberikan BPS kepada K/L terkait untuk melakukan pengumpulan datanya. Komponen rutin yang diselenggarakan BPS terkait isu pertahanan dan keamanan adalah:

1. Penyusunan Statistik Politik Keamanan, dengan tujuan sebagai berikut:
 - a) Menghimpun data statistik politik dan keamanan.
 - b) Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu.
 - c) Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.
2. Survei Perilaku Anti Korupsi, yang bertujuan untuk:
 - a) Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia.

- b) Mengukur sejauh mana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Stranas PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi.
3. Survei Demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk:
- a) Mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia.
 - b) Mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
 - c) Memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
 - ii. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - i. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
 - ii. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan

- iii. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.
Strategi yang dilakukan:
 - a. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
 - b. Memperbaiki metode pengumpulan data;
 - c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
 - d. Membuat *customer relationship management*;
 - e. Menyusun data mining pengguna data;
 - f. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
 - g. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
- 3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - i. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan mengikutkan sertakan pegawai yang memenuhi syarat untuk pendidikan yang lebih tinggi;
 - ii. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
 - iii. Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.
 - a. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar Training Need Analysis (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
 - b. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
- 4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
 - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.Strategi yang dilakukan:
 - a. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;

- b. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - c. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
 - d. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
 - e. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;
- Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:
- a. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik dan
 - b. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas
- Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Devision*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 *UN Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan:
- a. Menyusun quality gates dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik
 - b. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas BPS, yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi strategic enabler dan decision support system (DSS)

3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastuktur di BPS

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru; meningkatnya layanan statistik melalui multichannel dissemination; meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan Smart Office.



Gambar 3. 1. Interlink Antara Sistem dalam rangka Peningkatan Pelayanan Statistik
Rencana Strategis BPS Kabupaten Bandung Barat 2020 – 2024 | 31

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :
 - a) Meningkatkan akurasi data, melalui :
 - Integrasi proses bisnis; serta
 - Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
 - b) Memastikan kemitakhiran data dengan :
 - Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - Penggunaan *Big Data* untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
 - c) Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik.
 - d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
 - e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
 - f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia

2. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN). Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN

- b) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

- 4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul danberdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- i. Penerapan pengembangan SDM berdasar Human Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu dan dinamis
 - ii. Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA)
 - iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
- c) Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu
 - i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
 - ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit System)
 - vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family
 - vii. Talent pool untuk suksesi organisasi
- d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
 - ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT
 - ii. professional)
 - iii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai

- j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
 - iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k) Pewujudan Smart Office di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Merumuskan grand design smart office
 - ii. Implementasi smart office di BPS

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

- a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hukum dan tatakelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
- b) Gender
Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:

- i. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik
 - ii. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan
 - iii. memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS
 - iv. menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.
- c) Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

- d) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pematapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19 CORONA

VIRUS DISEASE 2019 atau disingkat COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka presiden menetapkan Kepres 12/2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. ditindaklanjuti dengan pemerintah menerbitkan Keppres 7/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, yang diperbarui dengan Keppres 9/2020 tanggal 20 Maret 2020 . Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Inpres 4/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran KL, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan refocusing anggaran berdasarkan Perpres 54/2020 tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42. Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020. Membatalkan

- metode wawancara yang dilakukan petugas diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/ telepon.
 3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
 4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara online.
 5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara online dari rumah.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Bandung Barat

BPS Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga vertikal, selain mengacu pada Visi dan Misi BPS Republik Indonesia mempunyai peranan untuk mendukung pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 - 2023 yang mempunyai visi :

“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”.

Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Kabupaten Bandung Barat mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Selain itu arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan di BPS Kabupaten Bandung Barat juga menyesuaikan dengan arah kebijakan BPS RI sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan serta tugas pokok BPS pada tingkat daerah. Arah kebijakan dan strategi di BPS Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 – 2024, dalam rangka mendukung agenda

prioritas pembangunan serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan
Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

Arah kebijakan : peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar.

Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :

- a) Meningkatkan akurasi data, melalui :
 - Integrasi proses bisnis; serta
 - Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
- b) Memastikan kemitakhiran data dengan :
 - Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
- f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Kabupaten Bandung Barat.

2. Meningkatkan Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Arah kebijakan : terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).

Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c. Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

3. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

Arah kebijakan :

1. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).
2. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
 - b. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.
3. Penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- b. Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

1. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai

2. Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu

- a. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
- b. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
- c. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*Merit System*)

3. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional

4. Pemanfaatan *Operation Management System* untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)

- b. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku

5. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.

6. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja.
Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
7. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
8. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima.
Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - b. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
 - c. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem

Prioritas Nasional yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS Kabupaten Bandung Barat

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020
Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan melalui, Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.

2. Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

3.3. Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Bandung Barat

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS Kabupaten Bandung Barat memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan Struktur Anggaran, terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS Provinsi.
Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :
 - a) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
 - b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
 - c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
 - d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas terdiri dari kegiatan generik, yaitu: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi;

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data.

Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- i. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- ii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- iii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- iv. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- v. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- vi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- vii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- viii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- ix. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- x. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- xii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- xiii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Secara lengkap setiap kegiatan beserta indikator kinerja, target pencapaian dan alokasi anggaran yang dibutuhkan disajikan dalam Lampiran 1. Hubungan antara visi, misi, tujuan sesuai dengan IKU Perka BPS Nomor 2 Tahun 2017 beserta penjabarannya sampai dengan kegiatan disajikan pada Tabel

3.1. Sedangkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran dan capaian program selama 2020 - 2024 ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 3. 1. Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN/INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju.	1 Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.	1 Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.	1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS.	1. Peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar.	1.a. Meningkatkan akurasi data. 1.b. Memastikan ketuntasan data. 1.c. Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik. 1.d. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional. 1.e. Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE. 1.f. Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral. 1.g. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. 1.h. Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.	1 PPIS	KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi)

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN/INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.1.1 Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.	2. Peningkatan <i>respons rate</i> .	2. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data.		
			1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.	3. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistic.		
	2 Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.	2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN.	2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN.	1. Terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).	1.a. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional. 1.b. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral. 1.c. Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 1.d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK.		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN/INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
			2.1.1	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	2. Penguatan fungsi yang menangani penyebaran informasi, dan kegiatan statistik.						
	3	Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional	3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	3.1	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	1. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. 2. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional. 3. Penyediaan statistik sektoral.	1. Mengoptimalkan penyebaran informasi kegiatan statistik BPS. 1. Menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN). 2.a. Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN. 2.b. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN. 3.a. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I. 3.b. Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik.	1	PDMPTTL	KEGIATAN 2886: BPS Provinsi (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)
			3.1.1	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.			3. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.				

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN/INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4 Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.	4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.	4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	<p>1. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS.</p> <p>2. Perbaikan sistem perencanaan karir, mutasi dan rotasi yang baik.</p> <p>3. Penguatan fungsi pembina jabatan fungsional.</p> <p>4. Pemanfaatan <i>operation management system</i> untuk meningkatkan kinerja pegawai.</p> <p>5. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja.</p>	<p>1.a. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai.</p> <p>2.a. Menyempurnakan system perencanaan karir dan mutasi pegawai.</p> <p>2.b. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM.</p> <p>2.c. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (<i>merit system</i>).</p> <p>3.a. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional.</p> <p>4.a. Menyesuaikan standarisasi kualitas SDM (sertifikasi <i>data scientist</i> dan IT profesional)</p> <p>4.b. Menyesuaikan standar sarana dan prasarana dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>5.a. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.</p>		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN/INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>6. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja.</p> <p>7. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.</p> <p>8. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima.</p> <p>9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar.</p>	<p>6.a. Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.</p> <p>7.a. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.</p> <p>7.b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran.</p> <p>8.a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima.</p> <p>8.b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.</p> <p>9.a. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan.</p> <p>9.b. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan.</p> <p>9.c. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem.</p>		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN/INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4.1.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat.				
			4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.				



BAB 4

Target Kinerja & Kerangka Pendanaan

4.1 TARGET KINERJA

4.2 KERANGKA PENDANAAN



4.1. Target Kinerja

Sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi untuk membangun profil dan perilaku aparatur BPS yang profesional, berintegritas tinggi dan amanah dalam memberikan pelayanan prima atas hasil data statistik berkualitas maka diperlukan penilaian sejauh mana kinerja pencapaian visi dan misi suatu organisasi berjalan. Dalam menilai sejauh mana tingkat keberhasilan dan capaian suatu organisasi maka haruslah dibuatkan suatu *level* target atas kinerja yang akan dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2020-2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung Barat untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu tersebut.

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan ketiga program disertai masing- masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*).

Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung Barat Periode 2020 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET KINERJA 2020
(1)	(2)	(3)	(5)
P1. Program Penyediaan dan Informasi Statistik BPS	S1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	IKKS1.1 Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	88
		IKKS1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	25
	S2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan SSN	IKKS2.1 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan	13
IKKS2.2 Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar		30	
	S3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	IKKS3.1 Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistic sectoral secara mandiri sesuai NSPK	13
P2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	S4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	IKKS4.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	61
		IKKS4.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	98

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Kabupaten Bandung Barat. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 2. Alokasi Anggaran 2020-2024 Menurut Program (Juta Rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	ALOKASI PROGRAM Teknis					
I.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	23.555,8	8.202,6	1.913,6	1.818,0	2.089,5
B.	ALOKASI PROGRAM GENERIK					
I.	Program Dukungan Manajemen (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)	4.742,0	5.191,0	5.639,9	5.402,4	5.621,2
TOTAL		28.297,8	13.393,6	7.553,5	7.220,3	7.719,7



BAB 5

Penutup



5.1. Penutup

Seiring dengan adanya dinamika perubahan setiap tahunnya maka perlu dilakukan perubahan (reviu) terhadap Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya. Rencana Strategis BPS Kabupaten Bandung Barat Periode 2020-2024 merupakan intisari dari Rencana Strategis BPS RI serta nilai inti (*core value*) BPS RI yaitu profesional, integritas dan amanah. Selain itu untuk menciptakan keselarasan dan koordinasi dalam pembangunan wilayah dan visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka Renstra BPS Kabupaten Bandung Barat juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas dan transparan. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 -2024 berfokus terhadap peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Dengan sasaran strategis BPS Kabupaten Bandung Barat untuk periode 2020-2024, yakni:

1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas;
2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN;
3. Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I;
4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan;

Renstra ini dijabarkan pelaksanaannya ke dalam penyusunan Rencana Aksi setiap triwulan dan Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. Selain itu dari sisi Anggaran maka Renstra 2020-2024 merupakan pedoman bagi penganggaran berbasis kinerja dalam organisasi dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Keterpaduan dan sinergitas antara rencana kerja dan pembiayaan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penganggaran berbasis kinerja.

Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS Kabupaten Bandung Barat 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS Kabupaten Bandung Barat. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS Kabupaten Bandung Barat merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS Kabupaten Bandung Barat menyadari bahwa untuk melakukan perubahan harus memiliki komitmen dan budaya kinerja yang tinggi yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS Kabupaten Bandung Barat



LAMPIRAN



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 36 Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat							6.796,5	13.393,6	7.533,5	7.220,3	7.719,7	
	SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas											Seluruh Seksi di BPS Kabupaten Bandung Barat
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	88	88	89	89	90						
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	25	25	30	30	35						
	SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN											
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	13	13	17	17	20						
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	30	30	40	40	50						
	SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I											
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	13	13	17	17	20						
	SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan											
	Nilai SAKIP BPS Kabupaten Bandung Barat	61.0	61.5	62	62.5	63						
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	98	98	99	99	99						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen							4.692,6	5.191,0	5.639,9	5.402,4	5.621,2	Subbag Tata Usaha
	Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan											
	Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)	0	0	0	0	0						
	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu (%)	40	40	55	55	55						
	Progres Pengembangan jabatan fungsional baru (%)	0	10	15	20	25						
	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS											
	Nilai SAKIP BPS Kabupaten Bandung Barat	61	61.5	62	62.5	63						
	Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard											
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	98	98	99	99	99						
KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)							4.692,6	5.191,0	5.639,9	5.402,4	5.621,2	Subbag Tata Usaha
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS												
	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	1	0	2	0	0						
	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	0	0	0	0	0						
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	0	0	0	0	0						
	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0	0	0	0	0						
	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0	0	0	0	0						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik											
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Yang Tepat Waktu	15	15	15	15	15						
	Layanan Perkantoran											
	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx (%)	100	100	100	100	100						
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx (%)	100	100	100	100	100						
PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							2.103,8	8.202,6	1.913,6	1.818,0	2.098,5	
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas											
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	88	88	89	89	90						
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	25	25	30	30	35						
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN											
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	30	30	40	40	50						
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	13	13	17	17	20						
	Persentase K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait Satu Data Indonesia (%)	13	13	17	17	20						
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I											
	Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya (%)	13	13	17	17	20						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 2897 : Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik)							12,8	47,5	49,2	50,9	52,7	Seksi IPDS
	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN											
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	6	6	6	6	6						
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	0	0	0	0	0						
	Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	4	4	5	5	6						
	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	4	4	5	5	6						
	Jumlah sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	0	1	2	3	4						
	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN											
	Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen	60	60	65	65	70						
	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS (%)	99	99	99	99	99						
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	10000	11000	12000	13000	14000						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	1	2	3	4						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik	0	1	2	3	4						
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	99	99	99	99	99						
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas data	98	98	99	99	99						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 2898: Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran)												Seksi Nerwilis
	Tersedianya data Neraca Pengeluaran yang berkualitas						18,6	26,2	28,3	30,5	32,7	
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	4	4	4	4	4						
	Jumlah <i>Release</i> data Neraca Pengeluaran yang tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB menurut pengeluaran	0	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)	83,9	84,0	85,0	86,0	87,0						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	90	92	94	96	98						
	Persentase permintaan data PDB/PDRB menurut pengeluaran yang disetujui (%)	0	0	0	0	0						
	Menguatnya statistik sectoral K/L/D/I											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik	0	0	0	0	0						
KEGIATAN 2899: Direktorat Statistik Neraca Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi)												Seksi Nerwilis
	Tersedianya data Neraca Produksi yang berkualitas						5,8	9,6	10,0	10,5	10,9	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>) / Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Kajian Rekomendasi SNA 2008 yang sudah diselesaikan	0	0	0	0	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)	82,1	83,0	84,0	85,0	86,0						
	Jumlah <i>Release</i> data Neraca Produksi yang tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB Lapangan Usaha	0	0	0	0	0						
	Persentase permintaan data PDB/PDRB; Tabel I-O; dan PDB Ekonomi Hijau yang disetujui (%)	0	0	0	0	0						
	Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) (%)	0	0	0	0	0						
	Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan berbasis <i>framework</i> terintegrasi seperti SUT (%)	0	0	0	0	0						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik	0	0	0	0	0						
KEGIATAN 2900: Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)												
	Tersedianya dukungan Metodologi Sensus dan survei yang tepat guna						42,9	53,22	55,70	58,23	60,83	Seksi IPDS
	Jumlah Dokumen desain sampling Sensus dan survei	0	0	0	0	0						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah publikasi standarisasi dan klasifikasi statistik yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Jumlah Dokumen Pengembangan kerangka Sampel survei yang mutakhir	0	0	0	0	0						
	Persentase data SBR yang <i>terupdate</i> (%)	0	0	0	0	0						
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS (%)	100	100	100	100	100						
	Jumlah sistem aplikasi Pengembangan desain sensus dan survey yang dikembangkan dan dipelihara	0	0	0	0	0						
	Jumlah laporan peta desa yang mutakhir	0	0	0	0	0						
	Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate	4496	4496	4496	4496	4496						
	Persentase <i>subject matter</i> yang melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik dengan Dit. PMSS (%)	0	0	0	0	0						
	Jumlah pembinaan kegiatan statistik (baik dari aspek desain, KBLI, kerangka sampel, maupun pemetaan)	0	0	0	0	0						
	Jumlah publikasi/laporan MSA yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0						
KEGIATAN 2902: Direktorat Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi)							13,7	14,7	15,2	15,7	16,2	Seksi Statistik Distribusi
	Tersedianya Data Statistik Distribusi Yang Berkualitas											
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Jumlah <i>Release</i> data Statistik Distribusi yang tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)	90	90	90	90	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik	0	0	0	0	0						
KEGIATAN 2903: Direktorat Statistik Harga (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)							63,8	57,4	59,4	61,5	52,7	Seksi Statistik Distribusi
	Tersedianya Data Statistik Harga Yang Berkualitas											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)	95	95	95	95	95						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	0	0	0	0	0						
	Jumlah <i>Release</i> data Statistik Harga yang tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Jumlah indikator/data yang memuat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan yang terdapat dalam publikasi	0	0	0	0	0						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0						
Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik	0	0	0	0	0							

KEGIATAN 2904: Direktorat Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi)						134,6	152,8	165,5	178,2	191,0	Seksi Statistik Produksi
---	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------------

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersedianya Data Statistik Industri Yang Berkualitas											
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu	6	6	6	6	6						
	Jumlah <i>Release</i> data Statistik Industri yang tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)	91	91	91	91	91						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> analisis dan pengembangan statistik	0	0	0	0	0						
KEGIATAN 2905 : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)						963,1	6.775,0	440,1	420,0	474,5	Seksi Statistik Sosial	
	Tersedianya Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Yang Berkualitas											
	Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Jumlah <i>Release</i> data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100						

	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik	0	0	0	0	0						
KEGIATAN 2906 : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)							435,0	472,6	600,4	510,7	532,4	Seksi Statistik Sosial
	Tersedianya Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas											
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	98,4	100	100	100	100						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik	0	0	0	0	0						
KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)							53,3	199,3	76,2	48,5	221,7	Seksi Statistik Sosial
	Tersedianya Data Statistik Ketahanan Sosial Yang Berkualitas											
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2						

	Jumlah <i>release</i> Statistik Ketahanan Sosial yang tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100							
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0							
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik	0	0	0	0	0							
KEGIATAN 2908: Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata)													Seksi Statistik Distribusi
	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Yang Berkualitas						46,7	51,6	58,6	65,6	72,6		
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0							
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	4	4	4	4	4							
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7							
	Jumlah <i>Release</i> data Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang tepat waktu	0	0	0	0	0							
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0							
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik	0	0	0	0	0							

KEGIATAN 2909: Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan)							7,6	8,4	8,7	9,0	9,3	Seksi Statistik Produksi
---	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Tersedianya Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Yang Berkualitas												
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0							
	Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1							
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100							
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	0	0	0	0	0							
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0							
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik	0	0	0	0	0							
KEGIATAN 2910: Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan)													
	Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Yang Berkualitas						306,0	334,3	346,3	358,6	371,1	Seksi Statistik Produksi	
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0							
	Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1							

Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100						
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)	88,9	90	90	90	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	0	0	0	0	0						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance</i> statistik	0	0	0	0	0						

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

*Jalan Raya Padalarang No. 763 Padalarang, Bandung Barat 40553
Telp. (022) 680 4400, Faks. (022) 680 4411, Email : bps3217@bps.go.id*